

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN BERDASARKAN LKPD KOTA MEDAN TAHUN 2022–2024

Amanda Putri Aisyah¹, Zaskia Zahira², Dwi Chandra Kesuma³, Renny Maisyarah⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi

E-Mail: amandaadjah20@gmail.com¹, zaskiazahira990@gmail.com²,
dwichandra4343@gmail.com³, rennymaisyarah@gmail.com⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022–2024. Analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari LKPD Kota Medan Tahun 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan mengalami perbaikan selama periode penelitian. Tingkat efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah secara cukup baik. Kondisi solvabilitas daerah tergolong sangat sehat karena nilai aset jauh lebih besar dibandingkan kewajiban. Namun demikian, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif tinggi sehingga kemandirian fiskal daerah perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Lkpd, Rasio Keuangan Daerah, Pad, Pemerintah Kota Medan.

PENDAHULUAN

Objek penelitian dalam studi ini adalah Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan transportasi di kawasan barat Indonesia. Posisi geografis yang strategis menjadikan Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Sebagai entitas sektor publik, Pemerintah Kota Medan memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, perubahan ekuitas, serta berbagai informasi penting lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. LKPD juga menjadi sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pengguna utama informasi keuangan sektor publik.

Penelitian ini menggunakan LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024 sebagai sumber data utama dalam melakukan analisis kinerja keuangan daerah. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tiga tahun dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi keuangan daerah secara lebih komprehensif serta memungkinkan dilakukan analisis tren kinerja keuangan pemerintah

daerah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan LKPD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Medan mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp5,45 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp6,05 triliun. Pada akhir tahun 2022 total aset daerah mencapai Rp34,89 triliun dengan total kewajiban sebesar Rp136,66 miliar dan ekuitas sebesar Rp34,75 triliun. Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat surplus operasional sebesar Rp258,99 miliar yang menunjukkan bahwa pendapatan operasional mampu menutupi beban operasional selama tahun berjalan.

Pada Tahun Anggaran 2023 kondisi keuangan Pemerintah Kota Medan menunjukkan perkembangan yang positif. Total aset meningkat menjadi Rp36,96 triliun, sedangkan ekuitas meningkat menjadi Rp36,52 triliun. Pemerintah Kota Medan juga berhasil mencatat surplus operasional sebesar Rp943,32 miliar atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi administrasi perpajakan daerah, peningkatan efektivitas belanja daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian keuangan. Pemerintah Kota Medan juga berhasil memenuhi ketentuan mandatory spending pada sektor pendidikan sebesar 22,28% dan sektor kesehatan sebesar 13,85% dari total belanja daerah. Selain itu, berbagai program pengendalian inflasi dan perlindungan sosial berhasil direalisasikan dengan baik guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Dari sisi struktur ekonomi daerah, Kota Medan memiliki karakteristik sebagai kota jasa dan perdagangan. Aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, serta berbagai sektor jasa lainnya yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi tersebut memberikan potensi yang besar bagi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Melalui analisis rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, pertumbuhan, dan solvabilitas, dapat diketahui sejauh mana tingkat kesehatan keuangan daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance).

Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan merupakan objek penelitian yang relevan untuk dikaji karena memiliki skala pengelolaan keuangan yang besar, peran strategis dalam perekonomian regional, serta menunjukkan perkembangan kinerja keuangan yang menarik untuk dianalisis berdasarkan data LKPD Tahun Anggaran 2022–2024. Bagian ini menjadi dasar untuk melakukan analisis rasio keuangan daerah guna menilai tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dilakukan melalui pengukuran beberapa rasio keuangan daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, mandiri, dan berkelanjutan. Rasio keuangan daerah merupakan salah satu alat analisis yang dapat

digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah berdasarkan data yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan atau transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 70,13%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp100 pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah mampu diimbangi oleh PAD sebesar Rp70,13. Menurut kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah, angka tersebut termasuk dalam kategori sedang menuju tinggi dengan pola hubungan partisipatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal tersebut didukung oleh karakteristik Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara yang memberikan potensi besar terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Meskipun demikian, kontribusi pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2022 pendapatan transfer mencapai Rp3,18 triliun atau sekitar 58,4% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga upaya peningkatan kemandirian fiskal perlu terus dilakukan melalui optimalisasi PAD.

Peningkatan kemandirian fiskal menjadi penting karena semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa bergantung pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan perlu terus memperkuat basis pendapatan daerah melalui digitalisasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

2. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 73,12%. Artinya, dari target PAD sebesar Rp3,05 triliun, pemerintah daerah hanya mampu merealisasikan sebesar Rp2,23 triliun.

Berdasarkan standar penilaian efektivitas keuangan daerah, nilai tersebut masih berada pada kategori kurang efektif karena belum mencapai angka 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergalai secara optimal.

Belum tercapainya target PAD dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, keterbatasan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi, serta adanya dampak kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas usaha masyarakat. Selain itu, penetapan target PAD yang terlalu tinggi juga dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat efektivitas.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data wajib pajak, memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan peningkatan efektivitas PAD akan berdampak langsung terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah karena semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

3. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah nilai rasio efisiensi maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 111,01%. Angka tersebut menunjukkan bahwa total belanja daerah yang direalisasikan lebih besar dibandingkan total pendapatan yang diterima selama tahun berjalan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 masih belum efisien karena untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp100 pemerintah daerah mengeluarkan belanja sebesar Rp111,01. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami defisit anggaran sebesar Rp597,88 miliar.

Tingginya rasio efisiensi tersebut dipengaruhi oleh besarnya realisasi belanja operasi yang mencapai Rp4,41 triliun atau sekitar 72,95% dari total belanja daerah. Belanja operasi yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang serta jasa merupakan kebutuhan rutin pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Di sisi lain, realisasi belanja modal mencapai lebih dari Rp1,12 triliun yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset daerah. Oleh karena itu, meskipun rasio efisiensi masih tergolong kurang baik, sebagian besar pengeluaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Ke depan, Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja melalui penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas perencanaan program, serta pengendalian belanja yang lebih ketat agar setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio solvabilitas Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 255,04 kali dan pada tahun 2023 sebesar 84,17 kali. Meskipun terjadi penurunan, nilai tersebut masih menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat.

Tingginya rasio solvabilitas menunjukkan bahwa jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Kota Medan jauh lebih besar dibandingkan kewajiban yang harus dibayar. Pada tahun 2022 total aset mencapai Rp34,89 triliun dengan kewajiban hanya Rp136,66 miliar, sedangkan pada tahun 2023 aset meningkat menjadi Rp36,96 triliun dengan kewajiban sebesar Rp439,15 miliar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko gagal bayar kewajiban pemerintah daerah sangat rendah. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Medan memiliki kapasitas keuangan yang sangat kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki.

Selain itu, tingginya tingkat solvabilitas juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban serta mengelola pembiayaan daerah secara hati-hati. Kondisi tersebut menjadi indikator positif bagi keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.

5. Analisis Pertumbuhan Aset Daerah

Pertumbuhan aset daerah merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan kapasitas ekonomi dan kekayaan pemerintah daerah dari waktu ke waktu.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total aset Pemerintah Kota Medan meningkat dari Rp34,89 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp36,96 triliun pada tahun 2023. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan aset mencapai 5,93%.

Peningkatan aset tersebut menunjukkan adanya penambahan sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah. Kenaikan aset terutama berasal dari bertambahnya aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta berbagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

Pertumbuhan aset yang positif mencerminkan adanya peningkatan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada masa yang akan datang.

Selain itu, peningkatan aset juga berdampak terhadap meningkatnya nilai ekuitas daerah. Pada tahun 2023 ekuitas Pemerintah Kota Medan meningkat menjadi Rp36,52 triliun dibandingkan Rp34,75 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bertambahnya kekayaan bersih pemerintah daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

6. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2022–2024

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama periode 2022–2024 berada dalam kondisi yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya nilai aset dan ekuitas daerah, terciptanya surplus operasional, serta tingginya tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Pada tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kota Medan juga berhasil memenuhi ketentuan mandatory spending pada sektor pendidikan dan kesehatan. Realisasi anggaran pendidikan mencapai 20,17% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 22,28% pada tahun 2024. Sementara itu, realisasi anggaran kesehatan mencapai 15,83% pada tahun 2023 dan 13,85% pada tahun 2024. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait efektivitas PAD dan tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Pemerintah Kota Medan perlu terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah, Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Kinerja tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan pada masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Medan menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik dan mengalami perkembangan yang positif selama periode penelitian. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai aset, ekuitas, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kemandirian sebesar 70,13% pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa daerah telah mampu menghasilkan sumber pendapatan sendiri dalam jumlah yang relatif besar. Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi sehingga tingkat ketergantungan fiskal masih perlu dikurangi melalui peningkatan kapasitas PAD.

Dari aspek efektivitas pendapatan daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas PAD sebesar 73,12% menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggalian potensi pendapatan daerah masih memerlukan perbaikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber-sumber PAD lainnya melalui inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi digital.

Analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh sehingga menghasilkan rasio efisiensi sebesar 111,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya efisien karena pemerintah daerah mengalami defisit anggaran. Meskipun demikian, sebagian besar belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan serta pembangunan infrastruktur melalui belanja modal yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan efisiensi belanja perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi solvabilitas, Pemerintah Kota Medan memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat. Hal ini terlihat dari tingginya rasio solvabilitas yang menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban. Pada tahun 2022 total aset mencapai Rp34,89 triliun dengan kewajiban sebesar Rp136,66 miliar, sedangkan pada tahun 2023 aset meningkat menjadi Rp36,96 triliun dengan kewajiban sebesar Rp439,15 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya sehingga risiko fiskal yang dihadapi relatif rendah.

Selain itu, pertumbuhan aset daerah sebesar 5,93% dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi dan kekayaan daerah. Peningkatan aset tersebut terutama berasal dari penambahan aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pelayanan publik. Bertambahnya aset daerah juga berdampak pada peningkatan nilai ekuitas pemerintah daerah yang mencerminkan semakin kuatnya posisi keuangan Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Pemerintah Kota Medan juga menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan anggaran sektor prioritas. Pada tahun 2023 dan 2024 pemerintah daerah berhasil memenuhi ketentuan mandatory spending bidang pendidikan dan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama periode 2022–2024 dapat dikategorikan baik, terutama dilihat dari aspek solvabilitas, pertumbuhan aset, peningkatan ekuitas, dan kemampuan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer agar tingkat kemandirian fiskal dapat semakin kuat. Upaya optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efisiensi belanja, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berhasil mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan memiliki prospek yang baik untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Jakarta: BPK RI.
- Bastian, Indra. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: DPR RI.
- Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, Deddi., Putra, Iswahyudi S., & Rahmawati, Maulidah. (2019). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Kota Medan. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Pemerintah Kota Medan. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Referensi Jurnal

Akuntansi Sektor Publik

- Arsa, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Rasio Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1021–1034.
- Nugroho, R., & Wibowo, A. (2022). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 45–59.
- Pratiwi, N., & Yuliana, S. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 88–101.
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 220–235.